

KONFLIK DAN POLA *DEFIANCE* WARGA PERWIRA DI KOMPLEK MILITER

Defi Arini Rahayuningtias

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
arinirahayu15291@yahoo.com

Arief Sudrajat

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
arief55281@yahoo.co.au

Abstrak

Komplek perumahan militer terdapat warga yang memiliki hierarki pangkat berbeda-beda sehingga mempengaruhi status dan peranan yang berdampak terhadap pola *defiance* dan konflik. Khususnya warga perwira (kelas atas) yang terbukti sering melakukan pola *defiance* yang dapat memicu konflik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi warga dan kepedulian sosial dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan Komplek Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola *defiance* dan konflik yang terjadi di kompleks perumahan militer sehingga mengakibatkan peranan dan status pihak pengelola lingkungan RW dan RT hanya sebagai simbol. Teori yang dipergunakan adalah teori stratifikasi konflik strukturalis Randall Collins. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Fenomenologi Edmund Huserl. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada 3 kategori pola *defiance* yaitu melalui verbal, sikap apatis, dan dominasi simbolik yang terbukti dilakukan oleh informan. Peneliti mendapat data berupa bukti konflik dan pola *defiance* terjadi, maka dapat diketahui yang paling sering dilakukan oleh warga perwira adalah sikap apatis. Sebagian besar warga perwira paling banyak melakukan pola *defiance* dengan sikap diam, acuh tak acuh, masa bodoh, dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap perkembangan situasi lingkungan sekitar yang ada. kemudian Konflik yang timbul yaitu konflik peran dan status yang dialami oleh pihak penanggung jawab setempat. Hal ini mengakibatkan aturan RT setempat tidak dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: konflik, *defiance*, pangkat.

Abstract

The Military housing complex there are people who have a different hierarchy of power that affect the status and role of the impact on the pattern of defiance and conflict. Especially residents officer (top class) which proved defiance frequent patterns that can lead to conflict, it can be seen from the level of citizen participation and social concern in the implementation of development in the Military Complex. This study aimed to describe the pattern of defiance and conflict that occurred in military housing complex, resulting in the manager role and status of RW and RT only as a symbol. The theory used is conflict stratification structuralist theory Randall Collins. This research is a qualitative descriptive approach Huserl Edmund Phenomenology. The results explain that there are 3 categories of patterns is through verbal defiance, apathy, and symbolic domination proved by informants. Researchers received data in the form of evidence of conflict and defiance pattern occurs, it can be seen that the most frequently performed by residents officer is apathy. Most of the people most committed officers defiance pattern with silence, indifferent, apathetic, indifferent and did not have an interest or concern to the development of the existing situation of the surrounding environment. The conflict that arises then is the role and status of the conflict experienced by the local responsible parties. This resulted in the RT local rules can not work well.

Keywords: conflict, defiance, rank.

PENDAHULUAN

Di era pembangunan bangsa dan Negara Indonesia ada beberapa unsur atau komponen yang perlu mendapat perhatian yang serius sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur atau komponen yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesejahteraan hidup yaitu Prajurit TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional yang profesional menuntut adanya integritas mental dan fisik serta intelektual, sedangkan mereka juga memperjuangkan istri, anak, dan keluarganya guna mendapatkan kesejahteraan hidup. Jaminan sosial pada

hakekatnya merupakan amanat konstitusional untuk meningkatkan harkat dan martabat setiap warga negara.

Adanya bantuan sosial yang diberikan oleh dinas menjadikan salah satu kebutuhan pokok utama telah terpenuhi. Fasilitas perumahan yang diberikan kepada para prajurit dapat menimbulkan kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya, seperti seseorang yang mempunyai wewenang dan kuasa umumnya berada dilapisan tinggi, sedangkan yang tidak punya wewenang berada dilapisan bawah.

Terdapat suatu permasalahan sosial mengenai lingkungan perumahan khususnya warga perumahan

militer. Pembangunan perumahan terlihat jelas pola hidup dan perilaku masyarakat yang dapat dipandang dari status sosial yang dimilikinya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Berdasarkan status sosial terdapat pembagian kelas-kelas sosial dan dapat difokuskan dengan jelas pada hierarki militer, terbagi kelas sosial atas (perwira) dari pangkat Kapten hingga Jendral, kelas sosial menengah (Bintara) dari pangkat Sersan dua hingga Sersan mayor, dan Kelas sosial bawah (Tamtama) Dari pangkat Prajurit hingga Kopral kepala (UUD RI no 34 pasal 26, 2004).

Keberadaan hierarki anggota militer mempengaruhi tingkat kepedulian sosial dan partisipasi di lingkungan masyarakat khususnya perumahan. Selama ini di kompleks perumahan militer masih banyak warga yang "keliru" memahami kedudukan, tugas dan peranan RT dan RW. Realitasnya selama ini di kompleks militer, Ketua RT hanya dijadikan "simbol" oleh warga di berbagai kegiatan. Warga militer yang melakukan pola pembangkangan (untuk selanjutnya disebut *defiance*) terhadap aturan yang berlaku di lingkungan sosialnya dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang dapat diartikan dalam bentuk ketidakpatuhan. Fenomena diatas sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian bahwa dalam Komplek perumahan Militer terdapat warga yang memiliki hierarki berbeda-beda sehingga, mempengaruhi status dan peranan yang berdampak terhadap tingkat partisipasi warga dan kepedulian sosial dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan kompleks militer. Kehidupan warga perumahan yang *notabene* merupakan anggota militer perlu ditindak lanjuti menjadi sebuah penelitian pada lingkungan RW agar dapat membuktikan terjadinya bentuk konflik dan pola-pola *defiance* lebih luas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dirumuskan masalah bagaimana pola *defiance* yang dilakukan oleh perwira dan bentuk konflik yang terjadi pada warga kompleks militer. Pada penelitian ini lebih difokuskan untuk memahami pola *defiance* dan konflik oleh warga perwira di kompleks perumahan militer sehingga mengakibatkan peranan dan status pihak penanggung jawab perumahan tersebut menjadi terhambat, dengan kata lain peran dan status pihak penanggung jawab seperti RT dan anggota panitia setempat sebagai simbol.

Permasalahan mengenai pola *defiance* dan konflik yang terjadi di kompleks militer karena hierarki pangkat yang dimiliki oleh warga militer dapat dikaitkan dengan teori-teori sosial yakni stratifikasi sosial. Manusia

pastinya akan mampu menilai perbedaan dalam masyarakat, jadi selama ada penilaian atas perbedaan, pelapisan sosial akan bertahan juga sebagai satu penentu penting daripada pola masyarakat atau *social structure* (Widjaja, 1986: 31-35).

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini yaitu teori stratifikasi konflik oleh Randall Collins. Gagasan-gagasan Collins (1975) tentang konsep kekuasaan, konflik di masyarakat, sumber daya dalam konflik, konflik, stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya, organisasi sebagai arena konflik, sumber daya dalam konflik meliputi material dan sumber daya teknik seperti kepemilikan kekayaan, alat produksi, dan senjata (Susilo, 2008:45). Sumber daya dalam konflik juga tidak terlepas dari peran dalam hubungan personal dan kemampuan negosiasi untuk mendapatkan material dalam meningkatkan status maupun menjual kemampuan kultural untuk memaksakan solidaritas emosional. Dalam hal ini Collins (1975) membagi menjadi 2 sumber daya dalam konflik yaitu *generalized cultural capital* (seperti: pengetahuan, posisi, otoritas dan pengelompokan) dan *particularized cultural capital* (seperti: identitas-identitas khusus, reputasi, jaringan dan posisi pada sebuah organisasi). Konflik yang timbul akibat stratifikasi diantara ke-2 sumber daya tersebut dapat menyebabkan dominasi yang berlebihan sehingga menimbulkan pola *defiance* terjadi.

Collins (1975:49) lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan intentitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilisasi. Pendekatan konflik terhadap stratifikasi dapat diturunkan menjadi tiga prinsip. Pertama, Collins yakin bahwa orang hidup dalam dunia subjektif yang dibangun sendiri. Kedua, orang lain mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subjektif seorang individu. Ketiga, orang lain sering mencoba mengontrol orang yang menentang mereka akibatnya adalah kemungkinan terjadinya konflik individu.

Sumber daya yang dimiliki warga berupa *generalized cultural* yaitu otoritas dan pengetahuan warga perwira yang lebih tinggi dan *particularized cultural* yaitu posisi atau pangkat di satuan kerja yang lebih tinggi sehingga jelas terlihat intensitas dominasi yang dilakukan oleh para warga yang berada pada lapisan atas (perwira) terhadap kelompok atau para warga yang berada pada lapisan bawah termasuk ketua RT beserta anggota panitia setempat. Sumber-sumber yang mendorong hal tersebut yaitu otoritas dan pengetahuan sehingga seseorang yang berkedudukan pada hierarki atas (perwira) berhak berkuasa dan mengatur. Terlebih lagi adanya sumber daya *particularized cultural* yang mana berupa posisi

atau pangkat di satuan kerja mereka. Apabila mayoritas warga perwira tidak dapat memposisikan dirinya sebagai warga ditengah-tengah masyarakat justru memicu pada pola *defiance*. Pola *defiance* yaitu pola tingkah laku berulang yang negatif, menantang dan tidak taat. Untuk diharapkan Seharusnya warga perwira dapat memposisikan diri sebagai warga masyarakat yang baik dan taat terhadap aturan. Sama halnya, situasi dan kondisi di kompleks perumahan Militer dimana ketua RT setempat yang seharusnya memiliki kewenangan mengatur setiap warganya justru terhambat peran dan status akibat intensitas dominasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2009:162) yang berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena sosial yang kemudian menghasilkan data yang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Pendekatan ini berguna untuk mengamati fenomena-fenomena konseptual subyek yang diamati melalui tindakan dan pemikirannya guna memahami makna yang disusun oleh subyek di sekitar kejadian sehari-hari (Ritzer, 2007: 59-62).

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah warga Perwira militer. Komplek militer Sidoarjo memiliki beberapa Blok perumahan dari A sampai L yang masing-masing Blok perumahan terdiri dari 2 RT dan setiap 4 blok perumahan terdiri dari 1 RW sehingga terpilih dari blok A, B, C, D. Alasan pemilihan blok perumahan tersebut dikarenakan keempat blok merupakan lokasi yang dihuni oleh warga militer yang memiliki lapisan pangkat paling menonjol dan bervariasi dalam hierarki militer.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipan dan wawancara mendalam. Tahap analisis data dilaksanakan setelah semua data dikumpulkan. Proses analisis tahap pertama dilakukan penyusunan data, yakni penyusunan paparan (transkrip) hasil wawancara dengan Ketua RT setempat, warga kompleks militer dan warga Perwira TNI yang menjadi informan hasil observasi dan dokumen-dokumen, berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya data dan informasi dianalisis sesuai dengan perspektif yang telah ditentukan. Kemudian Proses tahap kedua analisis data dilakukan secara induktif yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia, baik dari wawancara maupun observasi yang dituliskan dalam catatan lapangan (*fieldnote*) dan Proses terakhir data yang sudah terkumpul akan diklasifikasi, dikategorisasi, diinterpretasi, dan kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komplek militer yang dijadikan tempat penelitian merupakan perumahan yang dihuni oleh mayoritas para anggota militer dari pangkat tinggi hingga bawah. Keberadaan hierarki militerpun bertingkat-tingkat. Kelas atas Perwira (Kapten hingga Jenderal); Kelas Tengah Bintara (Sersan Dua hingga Sersan Mayor); Kelas Bawah Tamtama (Prajurit hingga Kopral Kepala). Keberadaan hierarki yang dimiliki oleh warga militer khususnya kelas atas perwira terbukti melakukan pola *defiance* yang dapat memicu timbulnya konflik peranan dan status yang dialami oleh pihak penanggung jawab di kompleks militer setempat, kebanyakan dari mereka tidak dapat memposisikan dirinya sebagai warga masyarakat yang seharusnya mengikuti segala aturan namun ternyata menyalahi aturan.

Sehubungan dengan konflik yang terjadi di kompleks militer akibat stratifikasi yang timbul karena perbedaan hierarki di setiap warganya yang *notabene* anggota militer sehingga jelas terlihat intensitas dominasi yang dilakukan oleh para warga yang berada pada lapisan atas (perwira) terhadap kelompok atau para warga yang berada pada lapisan bawah termasuk ketua RT setempat maupun panitia RT. Sumber-sumber yang mendorong hal tersebut yaitu posisi (jabatan) di satuan kerja yang wajib mengutamakan keberadaan hierarki sehingga seseorang yang berkedudukan pada hierarki atas (perwira) berhak berkuasa dan mengatur. Namun apabila mayoritas warga perwira tidak dapat memposisikan diri sebagai warga ditengah-tengah masyarakat justru mendorong pada pola *defiance* dan memicu konflik. Situasi dan kondisi di kompleks perumahan Militer dimana ketua RT setempat yang seharusnya memiliki kewenangan mengatur setiap warganya justru terhambat peran dan statusnya akibat intensitas dominasi. Dengan kata lain, seringkali terdominasi oleh warga yang berpangkat tinggi dapat menyebabkan perubahan ke arah negatif.

Konflik dalam permasalahan diatas berkaitan dengan stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya, Collins (1975) menjelaskan kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya namun Collins lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan intensitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilisasi. Konflik yang dilihat dari stratifikasi sosial adalah operasi lewat struktur dan intensitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok mengorganisasi dan memobilisasi dengan penguasaan sumber daya.

Berkaitan dengan konflik yang terjadi di kompleks militer akibat stratifikasi yang timbul karena 2 sumber daya yang dimiliki warga berupa *generalized cultural* yaitu otoritas dan pengetahuan warga perwira yang lebih

tinggi dan *particularized cultural* yaitu posisi atau pangkat di satuan kerja yang lebih tinggi sehingga jelas terlihat intensitas dominasi yang dilakukan oleh para warga yang berada pada lapisan atas (perwira) terhadap kelompok atau para warga yang berada pada lapisan bawah termasuk ketua RT setempat. Sumber-sumber yang mendorong hal tersebut yaitu otoritas dan pengetahuan sehingga seseorang yang berkedudukan pada hierarki atas (perwira) berhak untuk mengatur. Terlebih lagi adanya sumber daya *particularized cultural* yang mana berupa posisi atau pangkat di satuan kerja mereka. Apabila mayoritas warga perwira tidak dapat memposisikan dirinya sebagai warga ditengah-tengah masyarakat dapat memicu konflik peran dan status yang dialami oleh ketua RT beserta anggota panitia.

Intensitas dominasi dari para warga perwira mengakibatkan aturan RT setempat tidak berjalan. Warga perwira merasa memiliki sumber-sumber kekuasaan berupa pangkat atau jabatan yang dapat mendorong suatu kelompok mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas sosial. Dari konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan intentitas dominasi, dalam menggunakan kekuasaan berupa posisi atau jabatan dapat dianalisis bahwa warga perwira melakukan pola *defiant* yakni ketidaktaatan atau ketidakpatuhan warga. Perangsangnya dapat datang dari berbagai sumber sehingga dapat memperlihatkan bentuk tekanan yang terjadi secara perlahan-lahan mengenai pola-pola perubahan dan norma-norma kehidupan sosial. Terbangunnya *gap* (jurang pemisah) antara fakta-fakta sosial dengan fakta-fakta memaksa kemungkinan timbulnya tuntutan keras yang datang secara mendadak untuk mengubah kondisi negara sesegera mungkin.

Adanya intensitas dominasi dapat mendorong suatu pola *defiance* dalam kehidupan sosialnya khususnya di perumahan militer. Hal semacam itu memang kerap terjadi menurut para warga setempat, keberadaan hierarki dan jabatan itulah yang menyebabkan warga perwira bertindak sesuai keinginannya sendiri. Akibatnya banyak pola *defiance* yang terjadi dan memicu suatu konflik peran dan status. Dapat dikategorikan dari pola *defiance* yang terjadi yaitu verbal, sikap apatis dan dominasi simbolik.

Perilaku *defiance* yang terjadi di komplek ini terjadi karena intensitas dominasi yang sering dilakukan oleh para perwira. Menurut pihak penanggung jawab daerah setempat, dalam menjalankan hak peranan beliau merasa terhambat akibat warga yang diaturnya berpangkat lebih tinggi darinya yang secara otomatis para bawahan mau tidak mau terpaksa mengikuti keinginan para warganya. Terdapat berbagai variasi interaksi antara revolusi sosial dengan perubahan hukum. Faktor yang menyebabkan pola *defiance* dapat datang dari berbagai sumber sehingga

dapat memperlihatkan bentuk tekanan yang terjadi secara perlahan-lahan mengenai pola-pola perubahan dan norma-norma kehidupan sosial.

Permasalahan diatas yang timbul akibat adanya bentuk perlawanan secara verbal. Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan seseorang. Pelaku biasanya melakukan tindakan menyalahkan, atau juga mengkambinghitamkan. Pola *defiance* semacam itu terjadi di dalam komplek perumahan militer yang kerap dilakukan warga perwira seperti menghina, mengancam, memprotes dan mengkritik keras yang dikeluarkan melalui kata-kata terhadap pihak penanggung jawab yaitu RT. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut dapat menciptakan terbangunnya *gap* (jurang pemisah) antara fakta-fakta sosial dengan fakta-fakta memaksa kemungkinan timbulnya tuntutan keras yang datang secara mendadak untuk mengubah kondisi negara sesegera mungkin.

Penelitian ini sesuai dengan pemikiran Randal Collin (1975) yang menyebutkan intensitas dominasi yang dilakukan oleh warga perwira menggunakan kata-kata untuk membuat pihak penanggung jawab (ketua RT beserta panitia) terlecehkan melalui komunikasi secara kritis, sarkastik, kata-kata mengejek dimaksudkan untuk menjatuhkan seseorang dikala berduka atau di depan orang dalam kegiatan sosial. Selanjutnya, berteriak dan memaki dengan menggunakan ancaman untuk mengintimidasi, suka menyalahkan dan tidak memedulikan perasaan seseorang. Dari kategori tersebut, yang dominan adalah bentuk protes, penolakan, penghakiman disertai celaan, dan ancaman kepada pihak ketua RT beserta Panitia.

Kekerasan verbal dalam kehidupan sosial di lingkungan perumahan militer dipicu oleh adanya (a) ketimpangan kekuasaan warga perwira yang menduduki jabatan atau pangkat kelas atas dan ketua RT atau panitia sebagai pihak yang menduduki pangkat yang rendah, (b) adanya prasangka sosial warga perwira terhadap pihak penanggung jawab setempat, baik karena stereotype negatif maupun karena jarak sosial yang renggang antara warga perwira dan pihak penanggung jawab di komplek perumahan setempat. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pola *defiance* warga yaitu persoalan interaksi.

Persoalan interaksi merupakan salah satu persoalan yang sangat diperbincangkan dalam konteks perumahan. Interaksi antar tetangga tersebut juga merupakan satu persoalan yang relevan dalam pembahasan penelitian ini. Secara sosial, kompleks perumahan ini sangat homogen. Yaitu, kebanyakan warga mempunyai pola hidup dan tujuan hidup yang mirip. Kesamaan ini dapat memupuk hubungan antar warga. Namun, realitasnya hidup dengan orang dari status pekerjaan yang sama dianggap dapat menghalangi hubungan yang baik dan terdapat batasan

seperti di satuan kerja mereka, hal tersebut dikarenakan keberadaan hierarki atau pangkat militer. Keterikatan ini tak berhubungan. Kompleks perumahan ini seringkali memajukan kebebasan pribadi dan perpisahan antara warga perumahan. Jika diamati hubungan antar warga memang ada, namun hubungan ini bukan hubungan yang sesungguhnya. Melainkan, hubungan ini hanya berdasarkan minat dan pengkajian secara bersamaan.

Kurangnya komunikasi antar warga dengan warga dan warga dengan pihak RT atau panitia dapat menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak di hargai, seperti mencari pelampiasan misalnya salah satunya adalah *missed* komunikasi sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan sosial, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang berakhir dengan kekerasan dan kehancuran hubungan sosial.

Pola *defiance* yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya juga dapat terlihat dari sikap apatis yang terbukti sangat sering dilakukan oleh kebanyakan warga perwira. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat partisipasi dalam masyarakat dan gengsi sosial. Sebagian besar warga perwira melakukan pola *defiance* dengan sikap diam, acuh tak acuh, “masa bodoh”, “cuek” dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap perkembangan situasi lingkungan sekitar yang ada.

Sikap apatis yang sering ditunjukkan oleh kebanyakan warga perwira akan sangat mengancam proses perubahan lingkungan ke arah kemajuan. Untuk itu, peran serta warga masyarakat dalam mengawasi setiap bagian dari aktifitas sosial sangat diharapkan. Sikap yang paling banyak dimiliki oleh setiap warga perwira yaitu sikap kurang antusias bahkan tidak tertarik dalam suatu hal.

Selain dilihat dari tingkat partisipasi juga dapat diketahui warga yang cenderung memiliki rasa gengsi dari status sosial yang dimilikinya. Kompleks perumahan ini sering diidentikkan dengan keberadaan hierarki pangkat. Konsep gengsi sosial sangat sesuai dengan masalah ini karena secara garis besar gengsi sosial adalah sesuatu yg terdapat pada diri kita sendiri yang terkadang membuat kita berbuat sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, kita melakukannya hanya untuk mendapat pengakuan, atau mungkin sebaliknya, membuat kita tidak mau melakukan sesuatu karena dianggap bisa menurunkan gengsi. Dapat dibuktikan berkaitan dengan tingkat partisipasi warga dalam kegiatan sosial yang rendah.

Terdapat juga pola *defiance* secara dominasi simbolik yang terjadi di perumahan militer muncul dari adanya

suatu konflik atau pertentangan. Simbolik itu sendiri memiliki makna sebagai sebuah proses berkelanjutan baik berupa bahasa maupun tingkah laku (nonverbal) sebagai antisipasi dari reaksi yang diberikan oleh orang lain (Ritzer, 2007:51-59). Pola *defiance* secara simbolik oleh warga perwira telah ditemukan pada pola yang mengarah simbolik non verbal. Dimana terdapat warga yang melakukan suatu perilaku *defiance* terhadap aturan melalui interaksi antar individu, diantaranya oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau yang lebih menekankan pada bahasa tubuh dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.

Untuk membahas masalah ini tidak terlepas dari teori stratifikasi konflik Intensitas dominasi dari Randall Collins (1975) yang dilakukan oleh warga perwira dengan menggunakan sumber-sumber kekuasaan berupa posisi atau pangkat yang dapat memberikan perubahan kepada kelompok. Hal tersebut dapat memicu pola *defiance* terjadi karena warga perwira terbukti melakukan kekerasan secara simbolik terhadap pihak keamanan perumahan.

Ketika pemilik modal simbolik menggunakan intensitas dominasi berupa kekuasaannya, ini akan berhadapan dengan agen yang memiliki kekuatan lebih lemah, dan karena itu si agen berusaha mengubah tindakan-tindakannya. Maka, hal ini menunjukkan terjadinya kekerasan simbolik (non verbal). Terbukti dari penelitian yang telah dilakukan ketika salah seorang warga berinteraksi dengan pihak penanggung jawab keamanan yang menunjukkan rasa kekecewaannya melalui simbol-simbol non verbal. Warga perwira, yang menganggap pihak pengamanan ini tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan menunjukkan wajah dan tindakan yang menandakan rasa kurang senang seperti menggelengkan kepala dengan raut wajah yang penuh kesal. Simbol-simbol ini menyampaikan pesan bahwa warga perwira tidak simpati atau kecewa terhadap tindakan pihak pengamanan sehingga membuat pihak lawan merasakan tekanan meskipun tidak di representasikan melalui verbal atau ucapan. Collins memiliki tiga prinsip yaitu, (1) Collins yakin bahwa orang hidup dalam dunia subjektif yang dibangun sendiri, (2) orang lain mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengontrol pengalaman subjektif seorang individu, (3) orang lain sering mencoba mengontrol orang yang menentang mereka. Akibatnya adalah kemungkinan terjadinya konflik antar individu.

Konflik yang terjadi didalam kompleks perumahan militer yaitu antara warga perwira dengan pihak penanggung jawab perumahan. Melalui analisis pendekatan teori konflik Randall Collins lebih kepada konflik individual yang terjadi karena adanya kekuasaan

dan kekuatan untuk saling mempengaruhi orang lain dan terjadilah konflik antar individu, selain itu faktor posisi disatuan kerja seseorang maka dari itu individu terbukti tidak dapat memposisikan peran dan statusnya sebagai warga masyarakat untuk mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu khususnya warga perwira yang menjadi penyebab utama timbulnya konflik peran dan status yang dialami oleh pihak penanggung jawab RT seperti Ketua RT, RW beserta panitia. Pada pembahasan bab II sebelumnya, telah dibahas unsur-unsur stratifikasi. Dalam konflik yang terjadi didalam komplek perumahan militer berhubungan dengan unsur stratifikasi yaitu status dan peran sosial. Dapat diperdalam lagi melalui analisis tentang konflik status dan konflik peran untuk membahas beberapa kasus pada warga perwira TNI.

Konflik status bersifat individual yang terjadi di komplek perumahan militer. Konflik status yang dirasakan seseorang dalam batinnnya sendiri. Terjadi ketika seorang ketua RT memiliki dua status yang juga merupakan anggota militer kelas bawah. Harus dapat memposisikan menjadi ketua RT yang tegas dan juga sebagai anggota militer berpangkat bawah yang harus selalu tunduk dan patuh jika berhadapan dengan warga perwira yang diaturnya. Konflik status terjadi jika individu dalam masyarakat yang memiliki lebih dari satu status dan harus memilih status itu dalam waktu yang bersamaan.

Konflik status bersifat antar individu yang terjadi karena perbedaan strata sosial di komplek perumahan militer. Konflik status yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, karena status yang dimilikinya. Dalam realitasnya, ketua RT atau panitia RT (anggota militer kelas bawah) sering berselisih paham dengan warga komplek (anggota militer kelas atas) yang diaturnya. Permasalahan tersebut timbul karena perilaku seseorang berpikir membanding-bandingkan sumber daya yang dimiliki yakni *generalized cultural* berupa otoritas dan pengetahuan warga perwira yang lebih tinggi dan *particularized cultural* yaitu posisi atau pangkat di satuan kerja yang lebih tinggi (Narwoko,2004:21).

Sedangkan konflik peran yang lebih terlihat didalam komplek perumahan militer, terjadi apabila seseorang merasa dirinya tertekan dalam membawakan peran yang disandangnya. Konflik peranan timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Pada umumnya konflik peranan timbul ketika seseorang dalam keadaan tertekan, karena merasa dirinya tidak sesuai atau kurang mampu melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat kepadanya. Akibatnya, ia tidak melaksanakan peranannya dengan ideal/sempurna.

Konflik dalam satu peran, yaitu suatu konflik yang terjadi karena seorang individu dalam waktu yang sama

harus melakukan peranan yang berbeda. Misalnya, seorang ketua RT yang juga merupakan seorang prajurit militer dalam mengatur para warganya yang memiliki pangkat lebih tinggi darinya di dalam komplek militer mengalami hambatan karena warga perwira cenderung ingin menggunakan kekuasaan sehingga peran ketua RT menjadi tidak berjalan dengan baik dalam mengaturnya. Seharusnya warga perwira dapat memposisikan diri sebagai warga masyarakat yang baik dan taat terhadap aturan.

PENUTUP

Simpulan

Pola *defiance* yang dilakukan oleh para warga khususnya warga perwira dapat dikategorikan melalui 3 bentuk yaitu verbal, sikap apatis dan simbolik. Setelah peneliti mendapat data berupa bukti konflik dan pola *defiance* terjadi maka dapat diketahui yang paling sering dilakukan oleh warga perwira adalah sikap apatis. Sebagian besar warga perwira paling banyak melakukan pola *defiance* dengan sikap diam, acuh tak acuh, masa bodoh, cuek dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap perkembangan situasi lingkungan sekitar yang ada.

Ketiga kategori pola *defiance* yang terjadi dapat menimbulkan konflik peran dan status yang dialami oleh ketua RT atau anggota panitia (pihak penanggung jawab). Terbagi menjadi dua kategori konflik status yang dirasakan seseorang dalam batinnnya sendiri. Terjadi ketika seorang ketua RT memiliki dua status yang juga merupakan anggota militer kelas bawah. Harus dapat memposisikan menjadi ketua RT yang tegas dan juga sebagai anggota militer berpangkat bawah yang harus selalu tunduk dan patuh jika berhadapan dengan warga perwira yang diaturnya.

Saran

Melihat kepada sebab-sebab terjadinya masalah sosial khususnya yang terjadi di perumahan yang homogen profesinya sehingga terdapat lapisan pangkat, maka kita selaku pelaku sosial harus mampu meredam penyebab masalah sosial yang dapat menyebabkan akibat yang buruk dan berakhir pada ketidaknyamanan warga. Perlu adanya komitmen yang kuat dari masyarakat agar menjaga dan memelihara kenyamanan lingkungan perumahan sehingga tidak ada konflik dan pola *defiance* yang terjadi agar tercipta kenyamanan lingkungan dapat di tingkatkan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melihat pola *defiance* dan konflik berdasarkan stratifikasi sosial dan penelitian yang bersifat kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Susilo, Rachmad K. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Narwoko, J. Dwi, & Suyanto, Bagong (ed). 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, Goerge. 2007. *Sosiologi ilmu berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 26 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Widjaja, A.W. 1986. *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Akademika Pressindo.

